

MEMBANGUN SIKAP TOLERAN DAN DEMOKRATIS MELALUI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Abdul Gafur¹⁾; Siti Mutholingah²⁾; Misbahul Munir³⁾

¹⁾Universitas Nurul Jadid Probolinggo
email: abdulgafur020791@gmail.com

^{2), 3)}STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang
email: siti.mutholingah89@gmail.com; munirmisbahul1990@gmail.com

Abstract: The condition of Indonesian society which is plural and multicultural can trigger socio-religious conflicts. These conflicts can be reduced or even avoided if the Indonesian people always apply the values of tolerance and democracy in their daily life. In this case, Islamic education as a process and part of the national education system certainly has a very important role in the context of growing and developing a tolerant and democratic attitude for students. The implementation of Islamic Education should lead to the internalization of the values of tolerance and democracy which include the values of justice, freedom, responsibility, equality, deliberation, pluralism so that students become good individuals in their families, communities, countries and their environment.

Keywords: *tolerance, democratic, Islamic education*

Abstrak: Kondisi masyarakat yang plural dan multikultural di Indonesia terkadang dapat memicu timbulnya konflik-konflik social keagamaan di masyarakat. Konflik-konflik tersebut dapat direduksi atau bahkan dapat dihindari jika masyarakat Indonesia senantiasa menerapkan nilai-nilai toleransi dan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, pendidikan Agama Islam sebagai suatu proses dan bagian dari sistem pendidikan nasional tentunya mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan sikap toleran dan demokratis bagi peserta didik. Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam (PAI) hendaknya mengarah kepada internalisasi nilai-nilai toleransi dan demokrasi yang meliputi nilai keadilan, kebebasan, tanggung jawab, persamaan, musyawarah, kemajemukan sehingga peserta didik menjadi pribadi yang baik dalam keluarga, masyarakat, negara dan lingkungannya.

Kata kunci: toleran, demokratis, pendidikan Agama Islam

Pendahuluan

Maraknya konflik sosial yang terjadi di negara Indonesia, terutama yang berbasis isu agama bisa dipicu oleh kondisi masyarakat Indonesia sendiri yang memang sangat majemuk. Keberagaman budaya, suku, agama dan lain sebagainya memang sangat memungkinkan untuk melahirkan adanya persesekan-pergesekan yang dapat memicu konflik social keagamaan. Beberapa tahun terakhir ini, kekerasan berbasis isu agama begitu cepat menyebar ke berbagai lapisan masyarakat. Ketentraman hidup masyarakat sangat terganggu oleh kerentanan yang luar biasa oleh kondisi keberagaman tersebut. Sedikit saja ego keagamaan disinggung, maka reaksi yang ditimbulkan sangat besar dan berlebihan. Reaksi tersebut saat ini hampir selalu berupa kekerasan yang menciptakan kecemasan dan kaitannya dengan hubungan antar umat beragama

di masyarakat. Agama sering kali dijadikan titik singgung paling sensitif dalam pergaulan masyarakat yang majemuk. Maka dari itu sangat perlu usaha manusia untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antar umat manusia, salah satu caranya yaitu mengembangkan sikap toleran dan demokratis di masyarakat.

Sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 pasal 29 ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kebebasan warganya untuk memeluk agama maupun beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Olehnya itu kita sebagai warga Negara sudah sepatutnya menjunjung tinggi sikap saling toleransi antar umat beragama dan saling menghormati antar hak dan kewajiban yang ada diantara kita demi keutuhan Negara. Kebebasan beragama pada hakikatnya adalah dasar bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama. Tanpa kebebasan beragama tidak mungkin ada kerukunan antar umat beragama. Kebebasan beragama adalah hak setiap manusia. Hak untuk menyembah Tuhan diberikan oleh Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang boleh mencabutnya.

Sedangkan demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang menekankan kedaulatan berada di tangan rakyat. Lebih lanjut dalam hal ini rakyat berpartisipasi atau memberikan aspirasi dalam merencanakan program pembangunan, rakyat terlibat dalam melaksanakan program pembangunan, dan rakyat juga dijadikan tujuan dengan program pembangunan yang telah dijalankan. Lebih lanjut, apabila dikaitkan dengan Islam, demokrasi ini seringkali identik dengan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan atau dikenal dengan istilah *syura*. *Syura* ini merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan ketika akan memecahkan permasalahan dalam upaya mencapai tujuan bersama. Hal itu dilakukan ketika akan memutuskan suatu perkara atau urusan dapat dilakukan dengan musyawarah (*syura*). Begitu pun dalam demokrasi hal ini merupakan salah satu esensi yang terkandung di dalamnya yaitu terkait adanya partisipasi rakyat dalam merencanakan dan menjalankan program pembangunan dalam kehidupan bernegara, hal ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk musyawarah.

Nilai-nilai toleransi dan demokrasi harus dikembangkan untuk membentuk jiwa menjadi figur-figur yang moderat, toleran dan demokratis. Nilai-nilai inilah yang sangat penting dikembangkan untuk membangun keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini. Dan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai toleransi dan demokrasi adalah melalui pendidikan Agama Islam.

Metode

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka. Penelitian pustaka atau studi pustaka (*library research*), yang pada dasarnya penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memecahkan suatu masalah berdasarkan sumber-sumber kepustakaan yang terkait.¹ Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dapat diperoleh dari berbagai dokumen. Dalam hal ini bahan yang dimaksud tidak hanya berasal dari buku-buku yang relevan dengan pembahasan penelitian, tetapi juga berupa bahan-bahan tertulis lainnya seperti jurnal, koran, majalah, dan lain-lain.

Adapun analisis yang penulis gunakan untuk menganalisis data studi ini yaitu analisis isi atau content analysis. Untuk pengecekan keabsahan data penulis menggunakan triangulasi sumber, yakni penulis mengkros cek dari berbagai literature yang ada terkait peran PAI dalam mengembangkan nilai-nilai demokrasi dan toleransi.

Pembahasan

1. Konsep Toleransi dalam Islam

a. Definisi Toleransi

Istilah toleransi adalah istilah modern, baik dari segi nama maupun kandungannya.² Istilah ini pertama kali lahir di Barat, di bawah situasi dan kondisi politis, sosial dan budayanya yang khas. Toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu *tolerantia*, yang artinya kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran. Dari sini dapat dipahami bahwa toleransi merupakan sikap untuk memberikan hak sepenuhnya kepada orang lain agar menyampaikan pendapatnya, sekalipun pendapatnya salah dan berbeda.³ Secara etimologis, istilah tersebut juga dikenal dengan sangat baik di dataran Eropa, terutama pada revolusi Perancis. Hal itu sangat terkait dengan slogan *kebebasan, persamaan* dan *persaudaraan* yang menjadi inti revolusi di Perancis. Ketiga istilah tersebut mempunyai kedekatan etimologis dengan istilah toleransi. Secara umum, istilah tersebut mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela dan kelembutan. Kevin Osborn mengatakan bahwa toleransi adalah salah satu pondasi terpenting dalam demokrasi.⁴ Sebab, demokrasi hanya bisa berjalan ketika seseorang mampu menahan pendapatnya dan kemudian menerima pendapat orang lain.

¹ Rochma Nur Ichromi, *Konsep Pendidikan Pranatal dalam Pandangan Dr. Mansur, M.A dan Ubes Nur Islam*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), hal. 42.

² Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama* (Jakarta : Perspektif, 2005), hal.212.

³ Zuhairi Misrawi, *Alquran Kitab Toleransi* (Jakarta : Pustaka Oasis, 2007), hal.161.

⁴ Kevin Osborn, *Tolerance*, (New York : 2003), hal. 11.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, toleransi yang berasal dari kata “toleran” itu sendiri berarti bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan), pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya) yang berbeda dan atau yang bertentangan dengan pendiriannya. Toleransi juga berarti batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Secara bahasa atau etimologi toleransi berasal dari bahasa Arab tasamuh yang artinya ampun, maaf dan lapang dada.⁵

Secara terminologi, menurut Umar Hasyim, toleransi yaitu pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, selama dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat atas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.⁶ Namun menurut W.J.S. Poerwadarminto toleransi adalah sikap/sifat menenggang berupa menghargai serta memperbolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian sendiri.⁷

Dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa toleransi adalah suatu sikap atau tingkah laku dari seseorang untuk membiarkan kebebasan kepada orang lain dan memberikan kebenaran atas perbedaan tersebut sebagai pengakuan hak-hak asasi manusia.

b. Landasan Toleransi dalam Islam

Allah Swt. Juga telah menunjukkan kepada umatnya agar selalu dapat bertoleransi masalah agama dengan menganut agama masing-masing yang ditegaskan dalam (Q.S Al-Kafirun 109:6) sebagai berikut:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

“Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.”

Dalam Al-Qur'an juga telah dijelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama, yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah: 256. Penegasan ayat ini bahwa tidak ada paksaan dalam

⁵ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir* (Yogyakarta: Balai Pustaka Progresif, t.th.), hal. 1098.

⁶ Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar menuju Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2009), hal.22.

⁷ W. J. S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal.184.

menganut keyakinan agama, Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Agamanya dinamai Islam, yakni damai. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama Islam.⁸

c. Bentuk-bentuk Toleransi

1) Toleransi Terhadap Sesama Agama

Adapun kaitannya dengan agama, toleransi beragama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan pada diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau yang berhubungan dengan ke-Tuhanan yang diyakininya. Seseorang harus diberikan kebebasan untuk menyakini dan memeluk agama (mempunyai akidah) masing-masing yang dipilih serta memberikan penghormatan atas pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut atau yang diyakininya. Toleransi beragama mempunyai arti sikap lapang dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah mereka menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang diyakini tanpa ada yang mengganggu atau memaksakan baik dari orang lain maupun dari keluarganya sekalipun.⁹

Dalam agama telah menggariskan dua pola dasar hubungan yang harus dilaksanakan oleh pemeluknya, yaitu: hubungan secara vertikal dan hubungan secara horizontal. Yang pertama adalah hubungan antara pribadi dengan Khaliknya yang direalisasikan dalam bentuk ibadah sebagaimana yang telah digariskan oleh setiap agama. Hubungan dilaksanakan secara individual, tetapi lebih diutamakan secara kolektif atau berjamaah (shalat dalam Islam).¹⁰ Pada hubungan ini berlaku toleransi agama yang hanya terbatas dalam lingkungan atau intern suatu agama saja. Hubungan yang kedua adalah hubungan antara manusia dengan sesamanya. Pada hubungan ini tidak terbatas pada lingkungan suatu agama saja, tetapi juga berlaku kepada semua orang yang tidak seagama dalam kerjasama dalam masalah-masalah kemasyarakatan atau kemaslahatan umum. Dalam hal seperti inilah berlaku toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama.

2) Toleransi Terhadap Non Muslim

Toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama berpangkal dari penghayatan ajaran masing-masing. Menurut said Agil Al Munawar ada dua macam toleransi yaitu toleransi statis dan toleransi dinamis. Toleransi statis adalah toleransi dingin tidak melahirkan kerjasama hanya bersifat teoritis. Sedangkan toleransi dinamis adalah toleransi aktif melahirkan kerja sama untuk

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir AlMishab*, (Jakarta : Lentera Hati, 2005), hlm 551-552.

⁹ Masykuri Abdullah, *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keragaman* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), hal.13.

¹⁰ Said Agil Al Munawar, *Fiqih Hubungan Antar Agama* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hal 102

tujuan bersama, sehingga kerukunan antar umat beragama bukan dalam bentuk teoritis, tetapi sebagai refleksi dari kebersamaan umat beragama sebagai satu bangsa.¹¹

Selain itu, Zuhairi Misrawi juga berpendapat dalam bukunya *al-Qur'an Kitab Toleransi* dengan mengatakan bahwa toleransi harus menjadi bagian terpenting dalam lingkup intraagama dan antaragama.¹² Lebih lanjut, ia berasumsi bahwa toleransi adalah upaya dalam memahami agama-agama lain karena tidak bisa dipungkiri bahwa agama-agama tersebut juga mempunyai ajaran yang sama tentang toleransi, cinta kasih dan kedamaian.¹⁴ Selain itu, Zuhairi memiliki kesimpulan bahwa toleransi adalah mutlak dilakukan oleh siapa saja yang mengaku beriman, berakal dan mempunyai hati nurani. Selanjutnya, paradigma toleransi harus dibumikan dengan melibatkan kalangan agamawan, terutama dalam membangun toleransi antar agama.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa toleransi antar umat beragama berarti suatu sikap manusia sebagai umat yang beragama dan mempunyai keyakinan, untuk menghormati dan menghargai manusia yang beragama lain. Dalam masyarakat berdasarkan Pancasila terutama sila pertama, bertakwa kepada Tuhan menurut agama dan kepercayaan masing-masing adalah mutlak. Semua agama menghargai manusia maka dari itu semua umat beragama juga wajib untuk saling menghargai. Dengan demikian antar umat beragama yang berlainan akan terbina kerukunan hidup.

d. Prinsip-prinsip Toleransi Beragama

Dalam melaksanakan toleransi beragama kita harus mempunyai sikap atau prinsip untuk mencapai kebahagiaan dan ketenteraman. Adapun prinsip tersebut adalah:

1) Kebebasan Beragama

Hak asasi manusia yang paling esensial dalam hidup adalah hak kemerdekaan atau kebebasan baik kebebasan untuk berfikir maupun kebebasan untuk berkehendak dan kebebasan di dalam memilih kepercayaan atau agama. Kebebasan merupakan hak yang fundamental bagi manusia sehingga hal ini yang dapat membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Kebebasan beragama atau rohani diartikan sebagai suatu ungkapan yang menunjukkan hak setiap individu dalam memilih keyakinan suatu agama.¹³ Kebebasan beragama sering kali disalah artikan dalam berbuat sehingga manusia ada yang mempunyai agama lebih dari satu. Yang dimaksudkan kebebasan beragama di sini bebas memilih suatu kepercayaan atau agama yang menurut mereka paling benar dan membawa keselamatan tanpa ada yang memaksa atau menghalanginya,

¹¹ Said Agil Al Munawar, *Fiqih Hubungan Antar Agama* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hal 102

¹² Zuhairi Misrawi, *Alquran Kitab Toleransi...*, hal.159.

¹³ Abd. Al Mu'tal As Saidi, *Kebebasan Berfikir dalam Islam* (Yogyakarta: Adi Wacana, 2009), hal. 4.

kemerdekaan telah menjadi salah satu pilar demokrasi dari tiga pilar revolusi di dunia. Ketiga pilar tersebut adalah persamaan, persaudaraan dan kebebasan.¹⁴

2) Penghormatan dan Eksistensi Agama lain

Etika yang harus dilaksanakan dari sikap toleransi setelah memberikan kebebasan beragama adalah menghormati eksistensi agama lain dengan pengertian menghormati keragaman dan perbedaan ajaran-ajaran yang terdapat pada setiap agama dan kepercayaan yang ada baik yang diakui negara maupun belum diakui oleh negara.¹⁵ Menghadapi realitas ini setiap pemeluk agama dituntut agar senantiasa mampu menghayati sekaligus memposisikan diri dalam konteks pluralitas dengan didasari semangat saling menghormati dan menghargai eksistensi agama lain. Dalam bentuk tidak mencela atau memaksakan maupun bertindak sewenang-wenangnya dengan pemeluk agama lain.

3) *Agree in Disagreement*

“*Agree in Disagreement*” (setuju di dalam perbedaan) adalah prinsip yang selalu digagas oleh Mukti Ali. Kemudian Said Agil Al Munawar mengemukakan beberapa pedoman atau prinsip, yang perlu diperhatikan secara khusus dan perlu disebar luaskan terkait persetujuan dalam perbedaan ini di bawah ini:

- (a) Kesaksian yang jujur dan saling menghormati (*frank witness and mutual respect*), semua pihak dianjurkan membawa kesaksian yang terus terang tentang kepercayaannya di hadapan Tuhan dan sesamanya, agar keyakinannya masing-masing tidak ditekan ataupun dihapus oleh pihak lain. Dengan demikian rasa curiga dan takut dapat dihindarkan serta semua pihak dapat menjauhkan perbandingan kekuatan tradisi masing-masing yang dapat menimbulkan sakit hati dengan mencari kelemahan pada tradisi keagamaan lain.¹⁶
- (b) Prinsip kebebasan beragama (*religious freedom*). Meliputi prinsip kebebasan perorangan dan kebebasan sosial (*individual freedom and social freedom*). Kebebasan individual sudah cukup jelas setiap orang mempunyai kebebasan untuk menganut agama yang disukainya, bahkan kebebasan untuk pindah agama. Tetapi kebebasan individual tanpa adanya kebebasan sosial tidak ada artinya sama sekali. Jika seseorang benar-benar mendapat kebebasan agama, ia harus dapat mengartikan itu sebagai kebebasan sosial, tegasnya supaya agama dapat hidup tanpa tekanan sosial.

¹⁴ Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang), hal. 22.

¹⁵ Ruslani, *Masyarakat Dialog Antar Agama, Studi atas Pemikiran Mubammad Arkoun* (Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya, 2000), 169.

¹⁶ Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar menuju Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama* (Surabaya: Bina Ilmu, 2008), hal.24.

- (c) Prinsip penerimaan (*Acceptance*) yaitu mau menerima orang lain seperti adanya. Dengan kata lain, tidak menurut proyeksi yang dibuat sendiri. Jika kita memproyeksikan penganut agama lain menurut kemauan kita, maka pergaulan antar golongan agama tidak akan dimungkinkan. Jadi misalnya seorang Kristen harus rela menerima seorang penganut agama Islam menurut apa adanya, menerima Hindu seperti apa adanya.
- (d) Berfikir positif dan percaya (*positive thinking and trustworthy*), setiap orang hendaknya berpikir positif dalam pergaulan dengan penganut agama lain. Karena orang yang berpikir negatif akan kesulitan dalam bergaul dengan orang lain. Selama agama masih menaruh prasangka terhadap agama lain, usaha-usaha ke arah pergaulan yang bermakna belum mungkin. Sebab kode etik pergaulan adalah bahwa agama yang satu percaya kepada agama yang lain, dengan begitu dialog antar agama antar terwujud.¹⁷

Mewujudkan kerukunan dan toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama merupakan bagian usaha menciptakan kemaslahatan umum serta kelancaran hubungan antara manusia yang berlainan agama, sehingga setiap golongan umat beragama dapat melaksanakan bagian dari tuntutan agama masing-masing.

2. Konsep Demokrasi dalam Islam

a. Pengertian Demokrasi

Secara etimologi, “*demokrasi*” berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi “*demos-cratein*” atau “*democratos*” (demokrasi) adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.¹⁸

Joseph A. Schmeter mengartikan demokrasi sebagai suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Adapun menurut Sidney Hook demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas kepada rakyat dewasa.¹⁹ Sedangkan Plamenatz mendefinisikan demokrasi sebagai “*government*

¹⁷ Said Agil Al Munawar, *Fiqih Hubungan Antar Agama* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hal. 49-51.

¹⁸ A. Ubaidillah, dkk., *Pendidikan Kewargaan Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), hlm. 162.

¹⁹ A. Ubaidillah, dkk., *Pendidikan Kewargaan (civic education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007), hlm. 131

by person freely chosen by and responsible to the governed? Demokrasi berarti pemerintahan yang dipilih secara bebas dan bertanggung jawab untuk memerintah.²⁰

Dalam pengertian yang lebih luas, Philipp C. Schmitter mendefinisikan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan tindakannya di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan wakil-wakil mereka yang terpilih.²¹ Dari berbagai prinsip umum yang tergambar dalam ragam pandangan ilmuwan mengenai batasan (definisi) tentang demokrasi menurut para pakar diatas, dapat dikembalikan pada tiga nilai utama yang terdapat pada prinsip eksistensial yang mendasari tumbuhnya demokrasi, yaitu: *kebebasan, kesamaan, dan kedaulatan suara mayoritas*.²²

Demokrasi yang sesungguhnya lahir dari adanya hak-hak manusia orang perorang dan yang harus diakui serta dipraktikkan. Karena itu walau kata demokrasi sudah lama dikenal, namun tidaklah ia serta merta atau ketika itu telah melahirkan substansi dari apa yang dimaksud dengan demokrasi.²³ Demokrasi baru dapat dikatakan tercipta apabila kebebasan yang bertanggung jawab dapat diwujudkan dan pengakuan akan hak-hak asasi bagi setiap individu telah ditegakkan, bukan persamaan hak-hak kelompok semata-mata dan bukan pula untuk tujuan menghimpun aneka kekuatan sosial yang ada.

b. Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Al-Qur'an

Dalam pandangan Islam, demokrasi tidak dapat tergambar wujudnya kecuali setelah terhimpun dalam satu kesatuan tiga unsur pokok, yaitu: persamaan, tanggung jawab dan tegaknya hukum berdasar syura dan atas dasar peraturan perundangan yang jelas dan tanpa pandang bulu. Karena itu, tidak berlebihan jika cendekiawan Mesir Abbas Mahmud al-Aqqad ketika menulis dalam bukunya *Al-Dimokratiyah fi al-Islam* yang dikutip oleh M. Quraish Shihab menyatakan bahwa: ide demokrasi dibentuk pertama kali dalam sejarah dunia oleh ajaran Islam. Betapa tidak, padahal agama inilah yang menyerukan ketiga unsur pokok di atas.²⁴ Allah berfirman menyangkut persamaan derajat antara semua manusia:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya

²⁰ Sukarna, *Demokrasi Versus Kediktatoran*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 2.

²¹ A. Ubaidillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarga(negara)an (civic education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2012), hlm. 67.

²² Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 75.

²³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hlm. 399-400.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hlm. 400-401.

orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S. al-Hujurat/49 : 13).

Seorang muslim yang menyerukan keharusan demokrasi dan menegakkannya, pada hakikatnya menegakkan prinsip-prinsip ajaran agama Islam dalam kehidupan bermasyarakat yang sehat, antara lain syura, amar makruf dan nahi munkar, dalam arti menganjurkan apa yang baik dalam pandangan agama dan masyarakat, dan menolak yang buruk, seperti ketidakadilan, pelanggaran hak-hak manusia, bahkan hak-hak makhluk dan sebagainya.

Mengenai konsep di dalam al-Qur'an, biasanya demokrasi disepadankan dengan kata syura'. Kata tersebut terambil dari akar kata yang pada mulanya berarti "*mengeluarkan madu dari sarang lebah*". Makna ini kemudian berkembang hingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil dari pihak lain, termasuk pendapat. Kitab suci al-Qur'an memuji masyarakat yang melakukan musyawarah dalam urusan mereka (Q.S. asy-Syurā ayat 38) dan memerintahkan untuk melakukannya dalam kehidupan rumah tangga (Q.S. ath-Thalaq ayat 6) serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Q.S. Āli „Imrān ayat 159).

Di antara petunjuk agama menyangkut sifat-sifat yang harus dipenuhi oleh manusia-manusia yang bertugas bermusyawarah itu, antara lain, *akal sehat, pengetahuan, kelapangan dada, pengalaman, perhatian, ketulusan, dan takwa*. Jika sebagian dari mereka yang menyandang sifat-sifat itu, walau bukan mayoritas, memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan mayoritas, maka sepatutnya pandangan tersebut dipertimbangkan dan didiskusikan beberapa kali dari berbagai aspeknya. Kalau belum ditemukan kata sepakat, setelah sekian aspek telah dikaji, maka ketika itu pandangan mayoritas dan minoritas sama-sama baik, hanya saja pandangan mayoritas karena lebih banyak yang menilainya baik, maka dapat diduga keras bahwa kebaikannya lebih banyak.²⁵

3. Konsep Pendidikan Agama Islam

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan bati, karakter), pikiran (intelektual) dan tubuh anak.²⁶ Sedangkan kata "Islam" dalam "pendidikan Islam" menunjukkan warna pendidikan tertentu, yaitu pendidikan yang berwarna Islam, pendidikan yang Islami, yaitu pendidikan yang berdasarkan Islam.²⁷

²⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hlm. 402-404.

²⁶ Abdul Khobir, *Filsafat Pendidikan Islam (Landasan Teoritis dan Praktis)*, (Pekalongan : STAIN Press, 2011), hlm.3.

²⁷ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm.24.

Dalam istilah pendidikan agama Islam, ada dua istilah kunci, yaitu pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam. Pendidikan Islam adalah proses transformasi dan internalisasi nilai-nilai Islam dan ilmu pengetahuan dalam rangka pengembangan fitrah dan kemampuan dasar yang dimiliki peserta didik guna mencapai keseimbangan dan kesadaran dalam berbagai aspek kehidupan yang berkesinambungan dan perkembangannya disesuaikan dengan situasi dan zamannya.²⁸

Definisi pendidikan agama Islam secara lebih rinci dan jelas, tertera dalam kurikulum pendidikan Agama Islam ialah sebagai upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertaqwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci alQur'an dan Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan serta penggunaan pengalaman.²⁹

Pendidikan agama Islam dibakukan sebagai mata pelajaran seharusnya dinamakan "Agama Islam", karena yang diajarkan adalah agama Islam bukan pendidikan agama Islam. Nama kegiatannya atau usaha-usaha dalam mendidik agama Islam disebut sebagai pendidikan agama Islam.³⁰ Pendidikan Agama Islam lebih menekankan pada pembenahan perilaku, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi dalam proses pembelajarannya tidak hanya bersifat teoritis saja tetapi juga praktis yang mana ajaran Islam tidak memisahkan antara iman dan amal shaleh.

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Tujuan pendidikan seharusnya mempersiapkan individu untuk cakap dalam kehidupannya di tengah seluruh perubahan dan kemungkinan perkembangan zaman. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.³¹

Tujuan pendidikan agama Islam seperti yang tertulis dalam depdiknas menyebutkan pendidikan agama Islam bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan, melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengalaman serta pengalaman peserta

²⁸ Remiswal dan Rezki Amelia, *Format Pengembangan Strategi PAIKEM dalam Pembelajaran Agama Islam*, (Yogyakarta ; Graha Ilmu, 2013), hlm. 5.

²⁹ Heri Gunawan, *Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 208.

³⁰ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm 6.

³¹ Bambang Qanees dan Adang Hambali, *Pendidikan Karakter Berbasis AlQur'an*, (Bandung : Refika Offset, 2009), hlm. 49-50.

didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketaqwaannya kepada Allah swt. Serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.³²

Tujuan pendidikan Islam itu juga merupakan bagian dari tujuan Islam itu sendiri yang sekaligus dapat dijadikan sebagai tujuan hidup umat Islam. Adapun tujuan hidup umat Islam adalah mengabdikan kepada Allah dengan mengharapkan keridhaan-Nya. Tujuan ini berpedoman kepada firman Allah dalam surat al-Bayyinah ayat 5 yakni bahwa tujuan dari penciptaan manusia oleh Allah adalah untuk mengabdikan kepada-Nya, maka dapat dikatakan apapun yang dilakukan oleh manusia adalah rangka melakukan pengabdian. Karenanya segala aspek yang meliputi kehidupan manusia adalah untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada Allah.³³

4. Penanaman Nilai-nilai Toleransi dan Demokrasi melalui PAI

a. Penanaman Nilai-nilai Toleransi melalui PAI

Pada dasarnya sikap toleransi dapat dikembangkan melalui proses pendidikan. Adapun indikator dalam mengembangkan sikap toleransi beragama menurut UU SIDIKNAS No. 20 Tahun 2003 adalah pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa dan setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.³⁴

Lebih lanjut lagi indikator toleransi beragama pada pembelajaran pendidikan agama Islam adalah:

- (a) Dalam proses pembelajaran guru berusaha untuk menghindari pandangan-pandangan atau sindiran-sindiran negatif pada agama lain dan Seluruh pesan kebencian harus dihilangkan.
- (b) Guru selalu bersikap hormat ketika membicarakan kepercayaan atau komunitas agama lain.
- (c) Mengajak siswa untuk dapat berinteraksi dengan baik antar umat beragama yang berbeda.
- (d) Siswa-siswa dari berbagai agama diajak untuk bekerjasama dalam suatu kegiatan sosial dan budaya.

³² Heri Gunawan, *Op.Cit.*, hlm. 206.

³³ Remiswal dan Rezki Amelia, *Op.Cit*, hlm. 7

³⁴ Heri Gunawan, *Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, hlm. 145.

- (e) Guru memberikan contoh kepada siswa-siswa untuk tidak melecehkan anak-anak dari kelompok minoritas, tetapi sebaliknya harus mengembangkan sikap toleran dan bertanggung jawab.
- (f) Para siswa dikenalkan secara terang-terangan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang majemuk. Mereka harus diajarkan ketrampilan dan pengetahuan yang dapat menjadikan mereka menguasai secara positif pluralisme budaya dan agama.
- (g) Para siswa tidak didorong untuk berfikir fanatik yang sempit, tetapi harus didorong untuk berfikir terbuka dan toleransi.
- (h) Para siswa dibantu untuk selalu merasa percaya diri dan yakin terhadap keimanannya sendiri, bukan dengan cara tertutup dan menghina pihak lain, tetapi dengan cara inklusif dan dengan melihat nilai yang positif dari keimanan agama lain.
- (i) Para siswa dididik agar peka dan perhatian kepada orang yang menderita, tertekan, tidak mampu membela diri mereka sendiri, diperas dan dimanfaatkan orang lain, tanpa mempertimbangkan apakah korban penderita berasal dari keyakinan yang sama ataukah berbeda.
- (j) Dalam pendidikan agama dimasukkan petunjuk kepada komitmen terhadap penolakan kekerasan, bahkan dalam mengajar tujuan yang mulia, maka prinsip-prinsip sikap anti kekerasan harus selalu dilakukan dengan cara yang beradab.³⁵

Salah satunya tujuan dari pembelajaran pendidikan agama islam adalah tidak hanya menghantarkan peserta didik untuk menguasai berbagai ajaran Islam, tetapi yang terpenting adalah bagaimana peserta didik dapat mengamalkan ajaran-ajaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Azyumardi Azra, bahwa “kedudukan pendidikan agama Islam di berbagai tingkatan dalam sistem pendidikan nasional adalah untuk mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia.³⁶

Inti dari tujuan pendidikan Islam tersebut adalah untuk membentuk akhlak yang baik salah satunya yaitu manusia yang memiliki sikap toleransi dalam bersosialisasi. Untuk merealisasi tujuan dan fungsi pendidikan yang dapat menumbuhkan sikap toleransi beragama pada peserta didik, pendidikan di sekolah harus menekankan penanaman nilai-nilai toleransi dalam pembelajaran PAI. Dengan demikian, akan dapat mempersiapkan anak didik secara aktif sebagai warga negara yang secara etnik, cultural dan agama beragam, menjadi manusia-manusia yang menghargai

³⁵ *Ibid.* Hal 154.

³⁶ Ruhyana, *Model Konsiderasi Pembelajaran Pai Materi Tasamub/Toleransi Di SMPKelas IX Dalam Internalisasi NilaiNilai Akhlak Mulia*, Blog at WordPress.com, October 4, 2 011.

perbedaan, bangga terhadap diri sendiri, lingkungan yang majemuk.³⁷ Metode yang dipilih dalam pembelajaran tidak boleh bertentangan dengan pembelajaran. Metode harus mendukung kemana kegiatan interaksi edukatif berproses guna mencapai tujuan. Tujuan pokok pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan anak secara individu agar bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya.³⁸

Proses pembelajaran yang baik hendaknya menggunakan metode secara bergantian atau saling bahu membahu satu sama lain sesuai dengan situasi dan kondisi. Tugas guru adalah memilih diantara ragam. Dalam kaitannya dalam proses pembelajaran agama, hal penting yang harus dipahami karakteristik pluralis yakni belajar dalam perbedaan, membangun sikap saling percaya, saling memahami dan saling menghargai.

b. Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi melalui PAI

Nilai demokrasi dalam pendidikan agama Islam adalah nilai-nilai yang mutlak diperlukan untuk mengembangkan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang lebih demokratis sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. Nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan islam meliputi nilai keadilan, kebebasan yang bertanggung jawab, persamaan, musyawarah, kemajemukan merupakan salah satu tujuan dan muatan dalam pelaksanaan pendidikan islam. Nilai-nilai demokrasi yang akan ditransformasikan ke dalam diri peserta didik tersebut pada gilirannya akan mengarahkan mereka dalam menata perilakunya, baik sebagai individu, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga Negara dan Makhluk Ciptaan Allah. Untuk itu, dalam praktiknya pada berbagai institusi pendidikan, suasana pembelajaran harus merupakan lingkungan demokratis di mana nilai-nilai demokrasi itu pertama sekali diperekenalkan, didikkan, dicontohkan, dan dipraktikkan oleh peserta didik.

Dalam konteks pembelajaran pendidikan yang demokratis menuntut adanya interaksi antara peserta didik dan pendidik dalam bentuk *egaliter* dan *equity* (kesetaraan atau sederajat dalam kebersamaan). Dengan adanya kesetaraan ini, kebebasan berinisiatif, berbeda aspirasi dan pendapat, serta keadilan dalam pendidikan akan terakomodasi dengan baik.³⁹

Pola pengajaran yang demokratis harus terjadi ke segala arah dan bukan hanya bersifat satu arah, yaitu pendidik ke peserta (*top down*), melainkan juga ada keseimbangannya, yaitu dari peserta didik dengan pendidik (*bottom up*) dan antar peserta didik dengan peserta (*network*). Dengan demikian, tidak ada lagi pemaksaan kehendak pendidik kepada peserta didik, tetapi yang akan

³⁷ Ainun Naim dan Ahmad Syauqi, *Pendidikan Multikultural*, hal. 212.

³⁸ Ismail SM, *Strategi Pembelajaran PAI Berbasis PAIKEM* (Semarang: Rasail, 2009), hal.17.

³⁹ Sudarman Danim. *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), h. 15

terjadi tawar menawar kedua belah pihak dalam menentukan tujuan, materi, media, proses belajar mengajar, dan evaluasi hasil belajarnya.

Dalam format pendidikan yang demokratis, pendidik juga harus berperan sebagai model idola atau figur teladan bagi anak didiknya.⁴⁰ seorang pendidik harus memiliki sifat-sifat yang positif, seperti bertanggung jawab, disiplin, berwibawa, bijaksanam inovatif, kreatif, berdedikasi tinggi, tak kenal menyerah, berwawasan luas, mengayomi anak didik, lapang dada, sederhana, jujur, adil, lugas, disiplin, empiric dan sebagainya. Pendidik yang demokratis juga memiliki sikap rendah hati (tawadhu) dan ikhlas. Sikap tawadhu akan menimbulkan simpatik dari anak didik, sedangkan sikap ujub akan menyebabkan guru kurang mendapat simpati.⁴¹ penghargaan sikap tawadhu dan ikhlas, seorang guru akan dapat menghargai muridnya sebagai makhluk yang memiliki potensi, disamping menyebabkan pendidik mampu bersikap dan bertindak demokratis dan humanis dalam menghadapi peserta didiknya.

Profil guru yang demokratis tidak bisa terwujud dengan sendirinya tetapi membutuhkan proses pembelajaran. Kelas merupakan forum yang strategis bagi guru dan murid untuk samasama belajar menegakkan pilar-pilar demokrasi. Bapak pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara mewariskan semangat “*ing madya mangun karsa*” yang intinya berporos pada proses pemberdayaan. Di sekolah guru senantiasa membangkitkan semangat bereksplorasi, berkreasi dan berprakarsa di kalangan siswa agar kelak tidak menjadi manusia-manusia yang hanya tunduk pada komando. Dengan cara demikian, kelas akan menjadi magnet demokrasi yang mampu menggerakkan gairah siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai demokrasi dan keluhuran budi secara riil dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi guru dapat menjadi sosok pemodelan, dimana segala perilakunya dapat menjadi tauladan bagi siswa dalam pembentukan karakter demokratis dalam dirinya. Jika dalam KBM di dalam kelas tidak beriklimkan demokrasi, maka dalam diri siswa tidak akan tertanam sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Implikasi nilai-nilai demokrasi hanya dapat dipahami, dicerna, dan dipraktikkan oleh seseorang setelah ia memiliki kepekaan nilai (*sensitivity of values*), dan kepekaan nilai hanya dimiliki oleh seseorang yang terlibat atau berinteraksi langsung dengan kehidupan empiric. Dan setiap peserta didik haruslah memiliki kepekaan yang tinggi terhadap nilai-nilai demokrasi pendidikan terkhusus pendidikan Islam.

⁴⁰ Haryanto Al-Fandi. *Desain Pembelajaran yang Demokratis dan Humanis*, hal.237

⁴¹ Al-Maududi, *Adab al-Dunya wa al-Din* (Beirut : Dar al-Fikr, tt), h. 80

Untuk mewujudkan KBM yang kondusif secara umum guru harus memiliki *capability* dan *loyalty*, yakni guru itu harus memiliki kemampuan dalam bidang ilmu yang diajarkannya, memiliki kemampuan teoritik tentang mengajar yang baik, dari mulai perencanaan, implementasi, sampai evaluasi. Guru harus bisa menampilkan nilai-nilai demokrasi ketika membuka, menyampaikan dan menutup pelajaran. Memiliki loyalitas keguruan, yakni loyal terhadap tugas-tugas keguruan yang tidak hanya di dalam kelas.

Seorang guru dituntut untuk menggunakan metode metode pembelajaran yang lebih demokratis (*democratic learning*) daripada metode *indoktrinatif*. Pembelajaran demokratis dapat diartikan sebagai suatu sistem pembelajaran yang sejauh mungkin menggunakan prinsip-prinsip demokrasi dalam mencapai tujuan pembelajarannya.

Dalam implementasi demokratis harus memerhatikan dan melakukan inovasi dalam elemen-elemen berikut : ⁴²

- (a) Kurikulum sekolah harus terdapat mata pelajaran yang menciptakan suasana demokratis sehingga memungkinkan berkembangnya nilai-nilai demokrasi pada pribadi peserta didik.
- (b) Sekolah diberikan kesempatan untuk memilih sendiri bahan belajar yang dinilai baik. Bahan belajarnya dikemas sedemikian rupa sesuai dengan kondisi dan situasi kehidupan peserta didik. Peserta didik harus dilihat sebagai subjek (pelaku) pendidikan yang memiliki kelebihan dan kekurangan, bukan sebagai objek yang diperlakukan semuanya oleh guru.
- (c) Proses pendidikan di sekolah harus menghargai kebebasan peserta didik dalam mengeskspresikan dirinya.
- (d) Ruang kelas ditata sedemikian rupa, posisi kursi meja tidak kau. Perpustakaan menyediakan buku-buku yang memadai dalam menunjang terwujudnya nilai-nilai demokrasi.
- (e) Guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, psikologis, dan sosial peserta didik.
- (f) Guru harus bersikap demokratis, guru harus berani menerima perbedaan, menghargai pendapat siswa, tidak sok tahu dan sok berkuasa, tetapi harus mampu menciptakan suasana belajar yang demokratis.
- (g) Peran guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber belajar karena banyak sumber belajar di sekitar siswa.
- (h) Guru hanya menjadi fasilitator, motivator, dinamisator dan konselor.
- (i) Sekolah perlu mengembangkan kegiatan intrakurikuler melalui muatan kewarganegaraan dan kokurikuler melalui kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan

⁴² Haryanto Al-Fandi. *Desain Pembelajaran yang Demokratis dan Humanis*,....hal. 250

(j) , bahasa, seni budaya, dan sebagainya.

Menciptakan proses pembelajaran yang mencerminkan penghayatan nilai-nilai demokratis sebagai berikut:

- (a) Proses pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang unik.
- (b) Pembelajaran hendaknya bersifat individual sesuai karakter siswa masing-masing.
- (c) Pembelajaran perlu diterapkan *system continuous progress* (maju berkelanjutan) yang membuka kesempatan perkembangan pribadi anak maju tanpa hambatan.
- (d) Pembelajaran dikemas dalam bentuk kelompok. Proses ini membantu peserta didik membina sikap toleransi, belajar menghargai pendapat sesama, saling membantu, mengadakan interaksi sosial, dan terbuka terhadap perubahan.
- (e) Pembelajaran ditata dan dikondisikan sedemikian rupa yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan pilihan-pilihan tindakan belajar dan mendorong mereka untuk terlibat secara fisik, emosional, dan mental dalam proses belajar.
- (f) Metodologi pembelajaran didesain sedemikian rupa yang memungkinkan peserta didik mengekspresikan dirinya secara optimal baik melalui media tulis maupun lisan.
- (g) Evaluasi dilakukan dua arah, guru ke siswa dan siswa ke guru. Guru harus rendah hati dan legowo menerima penilaian kinerjanya dari peserta didik.
- (h) Grafik prestasi kelas pribadi dipajang di ruang kelas untuk memperlihatkan posisi masing-masing peserta didik dalam pelajaran tertentu. Ini mengajarkan soal keterbukaan dan kejujuran kepada peserta didik untuk mengakui dan menyadari kelebihan serta kelemahannya sekaligus merangsang anak untuk meningkatkan motivasinya dan semangat juangnya untuk berprestasi.

Berupaya menciptakan kelas sedemikian rupa sehingga menjadi lingkungan kehidupan demokratis yang mikro (*microcosmos of democracy*) dan masyarakat menjadi open global classroom. Model-model pengembangan sikap demokratis dan tanggung jawab ini dapat dilakukan dengan menggunakan *good news class meeting*, *circle whip* dan *appreciation time*.⁴³

Kesimpulan

Toleransi adalah suatu sikap atau tingkah laku dari seseorang untuk membiarkan kebebasan kepada orang lain dan memberikan kebenaran atas perbedaan tersebut sebagai pengakuan hak-hak asasi manusia. Demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Penanaman nilai toleransi melalui pendidikan agama Islam dengan

⁴³ *Ibid.*, hal. 260

diselenggarakannya proses pembelajaran yang berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa sehingga peserta didik menjadi manusia-manusia yang menghargai perbedaan, bangga terhadap diri sendiri, menyadari akan lingkungan yang majemuk. Sedangkan penanaman nilai demokrasi melalui pendidikan agama Islam yaitu dengan mentransformasikan dan mengembangkan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang mengarah kepada internalisasi nilai-nilai demokrasi meliputi nilai keadilan, kebebasan, tanggung jawab, persamaan, musyawarah, kemajemukan sehingga peserta didik menjadi pribadi yang baik dalam keluarga, masyarakat, negara dan lingkungannya. Selanjutnya,

Daftar Rujukan

- Al-Maududi, *Adab al-Dunya wa al-Din*, Beirut : Dar al-Fikr, tt
- Abdullah, Masykuri, *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keragaman*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001
- Agama, Departemen, Republik, Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Duta Ilmu, 2002
- Agil, Said, Al Munawar, *Fiqih Hubungan Antar Agama*, Jakarta: Ciputat Press,
- Al Mu'tal, Abd., As Saidi, *Kebebasan Berfikir dalam Islam*, Yogyakarta: Adi Wacana, 2009
- Danim, Sudarman. *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003
- Gunawan, Heri, *Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Bandung : Alfabeta, 2013,
- Hasyim, Umar *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar menuju Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama*, Surabaya: Bina Ilmu, 2009
- Ismail SM, *Strategi Pembelajaran PAI Berbasis PAIKEM*, Semarang: Rasail, 2009
- Khobir, Abdul, *Filsafat Pendidikan Islam (Landasan Teoritis dan Praktis)*, Pekalongan : STAIN Press, 2011
- Malik, Anis, Thoha, *Tren Pluralisme Agama*, Jakarta : Perspektif, 2005
- Misrawi, Zuhairi, *Alquran Kitab Toleransi* Jakarta : Pustaka Oasis, 2007
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2010
- Nurtjahjo, Hendra, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008
- Osborn, Kevin, *Tolerance*, New York : 2003
- Poerwadarminto, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006
- Quraish, M., Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2*, Jakarta: Lentera Hati, 2010
- Quraish, M., Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2005
- Remiswal dan Rezki Amelia, *Format Pengembangan Strategi PAIKEM dalam Pembelajaran Agama Islam*, (Yogyakarta ; Graha Ilmu,2013), hlm. 5.

-
- Ruslani, *Masyarakat Dialog Antar Agama, Studi atas Pemikiran Muhammad Arkoun* (Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya, 2000)
- Sakti, Suryo, Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Sukarna, *Demokrasi Versus Kediktatoran*, Bandung: Alumni, 2001
- Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005
- Ubaidillah, A., dkk., *Pendidikan Kewargaan Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000
- Warson, Ahmad, Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, Yogyakarta: Balai Pustaka Progresif, t.th